
BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam rangka pelayanan prima, kualitas pelayanan aparatur pemerintah dituntut untuk selalu meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan guna mendukung pemberian pelayanan dan manajemen yang baik kepada aparatur maupun masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, komitmen Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan daya saing daerah diperlukan dukungan semua pihak terutama kesiapan aparatur pemerintah karena sebagai ujung tombak bersama – sama dengan pihak swasta untuk berbenah diri guna mewujudkan pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dan manajemen yang baik kepada masyarakat.

Salah satu cara pembenahan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang adalah dengan menetapkan Rencana Kerja Tahun 2018 sebagai pedoman dan acuan bagi setiap aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna melaksanakan kegiatan yang direncanakan dalam tahun 2018 serta pemberian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan profesionalisme masing-masing aparatur pada Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja ini diharapkan nantinya dapat dievaluasi kinerja masing-masing aparatur dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada akhir tahun 2018.

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Tahun 2018. Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu ikut mendorong tercapainya sasaran pembangunan perikanan

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang tahun 2018 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974, tentang pokok pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangan Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undangan Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

-
-
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 7. Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang penetapan Kinerja ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;
 9. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.
 10. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
 11. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang Pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang;
 12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang pengaturan hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 13. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan dan pemanfaatan sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 14. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

B. KEDUDUKAN

Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2018 merupakan pedoman dan acuan bagi setiap aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna melaksanakan kegiatan yang direncanakan dalam tahun 2018 serta pemberian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan profesionalisme masing-masing aparatur pada Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Bupati Lumajang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang perikanan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengelolaan sumberdaya perikanan, bina mutu dan daya saing produk perikanan;

-
-
2. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengelolaan sumberdaya perikanan, bina mutu dan daya saing produk perikanan;
 3. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas;

Sesuai dengan Perda No. 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

- Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memutuskan, menetapkan memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dinas serta mengkoordinasi dan membina UPTD..

- Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan , hubungan masyarakat (Humas) dan protokol..

- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai, melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan, menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program, melaksanakan pengolahan data, melaksanakan perencanaan program, menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan, menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Melaksanakan monitoring dan evaluasi, melaksanakan penyusunan laporan, Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian barang, melakukan perawatan/pemeliharaan dan perbaikan terhadap barang inventaris kantor, menyusun laporan pertanggungjawaban atas hasil pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan barang inventaris, melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan , usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris, melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan dinas, menyelenggarakan tata usaha kepegawaian, menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan, melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat, mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai

penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah/ janji pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi, dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, , izin belajar, pembinaan kepegawaian, dan disiplin pegawai, menyusun standarkompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya, melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset, dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

- **Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan**

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengembangan perikanan tangkap.

- **Kapala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan**

Kapala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap, menyiapkan data dan informasi statistik perikanan tangkap, menyiapkan bahan analisis kebutuhan perahu penangkap ikan dan pengangkut ikan dibawah 5 GT, menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap dan pengadaan perahu penangkap ikan dan pengangkut ikan berukuran dibawah 5 GT, menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan upaya konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hayati serta mitigasi bencana dan pencemaran, menyiapkan bahan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha, menyiapkan bahan kebijakan pemanfaatan wilayah laut, pesisir, menyiapkan data dan informasi statistik perikanan tangkap dan pengawasan, melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang,

- **Kepala Seksi Pangkalan Pendaratan Ikan**

Kepala Seksi Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), menyiapkan bahan analisis penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), menyiapkan bahan kebijakan jaminan mutu hasil perikanan tangkap, menyiapkan bahan kebijakan operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang,

- **Kepala Seksi Kenelayanan**

Kepala Seksi Kenelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi permodalan dan investasi perikanan tangkap, menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi

penguatan kelompok nelayan, menyiapkan bahan kebijakan pengembangan teknologi perikanan tangkap, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

- **Kepala Bidang Perikanan Budidaya**

Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengembangan perikanan budidaya

- **Kepala Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya**

Kepala Seksi Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pengembangan produksi dan usaha perikanan budidaya, menyiapkan bahan kebijakan penyebarluasan teknologi perbenihan dan budidaya, menyiapkan data dan informasi statistik perikanan budidaya, menyiapkan bahan kebijakan standarisasi mutu perbenihan dan budidaya ikan, menyiapkan bahan kebijakan ketersediaan benih bermutu, calon induk dan induk unggul, menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi kelompok pembudidaya, menyiapkan bahan kebijakan pengembangan dan fasilitasi usaha perikanan budidaya, menyiapkan bahan kebijakan pengembangan teknologi perikanan budidaya, menyiapkan bahan informasi usaha dan teknologi perikanan budidaya, menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi permodalan dan investasi perikanan budidaya, menyiapkan bahan rekomendasi teknis perijinan usaha perikanan budidaya di dalam wilayah kabupaten, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan produksi dan usaha perikanan budidaya, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- **Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya**

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan, menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi sarana usaha kelompok pembudidaya ikan, melaksanakan bahan kebijakan fasilitasi standarisasi mutu sarana produksi perikanan budidaya, menyiapkan bahan kebijakan bimbingan teknis di bidang sarana prasarana perikanan budidaya, menyiapkan bahan kebijakan evaluasi di bidang sarana prasarana perikanan budidaya, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sarana dan prasarana perikanan budidaya, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- **Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya**

Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, menyiapkan bahan kebijakan pengendalian penggunaan obat ikan, menyiapkan bahan

kebijakan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya air untuk perikanan budidaya di perairan umum, menyiapkan bahan kebijakan pelestarian dan pemulihan sumberdaya ikan budidaya dan lingkungan, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- **Kepala Bidang Bina Mutu dan Daya Saing Produk Perikanan**

Kepala Bidang Bina Mutu dan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengembangan mutu dan daya saing produk hasil perikanan.

- **Kepala Seksi Askes Pasar, Promosi dan Logistik**

Kepala Seksi Askes Pasar, Promosi dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pengembangan askes pasar produk hasil perikanan, menyiapkan bahan kebijakan peningkatan konsumsi ikan, melaksanakan promosi produk hasil perikanan, menyiapkan bahan kebijakan distribusi produk hasil perikanan secara merata, fasilitasi sistem logistik dan pemasaran produk hasil perikanan, melaksanakan pembinaan kelompok pemasar produk hasil perikanan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- **Kepala Seksi Bina Mutu dan Deversifikasi Produk Hasil Perikanan**

Kepala Seksi Bina Mutu dan Deversifikasi Produk Hasil Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pengembangan teknologi pengolahan Perikanan, menyiapkan bahan kebijakan jaminan mutu dan keamanan produk hasil perikanan, menyiapkan bahan kebijakan deversifikasi produk olahan hasil perikanan, menyiapkan bahan kebijakan pengembangan produk non konsumsi hasil perikanan, melaksanakan pembinaan kelompok pengolah produk hasil perikanan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang,

- **Kepala Seksi Usaha dan Kelembagaan**

Kepala Seksi Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan peningkatan kelas kelompok pengolah dan pemasar produk hasil perikanan, menyiapkan data dan informasi statistik pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan, menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi kelompok pengolah dan pemasar produk hasil perikanan, melaksanakan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar produk hasil perikanan, menyiapkan bahan kebijakan peningkatan investasi dan penumbuhan pelaku usaha produk hasil perikanan, menyiapkan bahan informasi pengembangan investasi, menyiapkan bahan rekomendasi teknis perijinan hasil perikanan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Fungsi

- Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis perikanan yang meliputi
- b. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengelolaan sumberdaya perikanan, bina mutu dan daya saing produk perikanan ;
- c. Penyelenggaraan koordinasi kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;

- Sekretaris Dinas

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan dan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan dan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan dan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

- Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan teknologi perikanan tangkap ;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok nelayan;
- e. Pelaksanaan rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap;;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan Pangkalan Pendaratan Ikan;
- g. Penyiapan bahan kebijakan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut

-
-
- h. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
 - i. Penyiapan bahan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum pemanfaatan sumberdaya Perikanan
 - j. Penyusunan kebijakan fasilitasi kelompok masyarakat pesisir
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- **Kepala Bidang Perikanan Budidaya**

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan perikanan budidaya;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi usaha perikanan budidaya;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- e. Penyiapan perumusan kebijakan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang perikanan budidaya;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan;
- g. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- h. Penyiapan perumusan kebijakan pelestarian dan pemulihan sumberdaya ikan budidaya dan lingkungan;
- i. Pelaksanaan rekomendasi teknis perizinan usaha perikanan budidaya di dalam wilayah kabupaten;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

- **Kepala Bidang Bina Mutu dan Daya Saing Produk Perikanan**

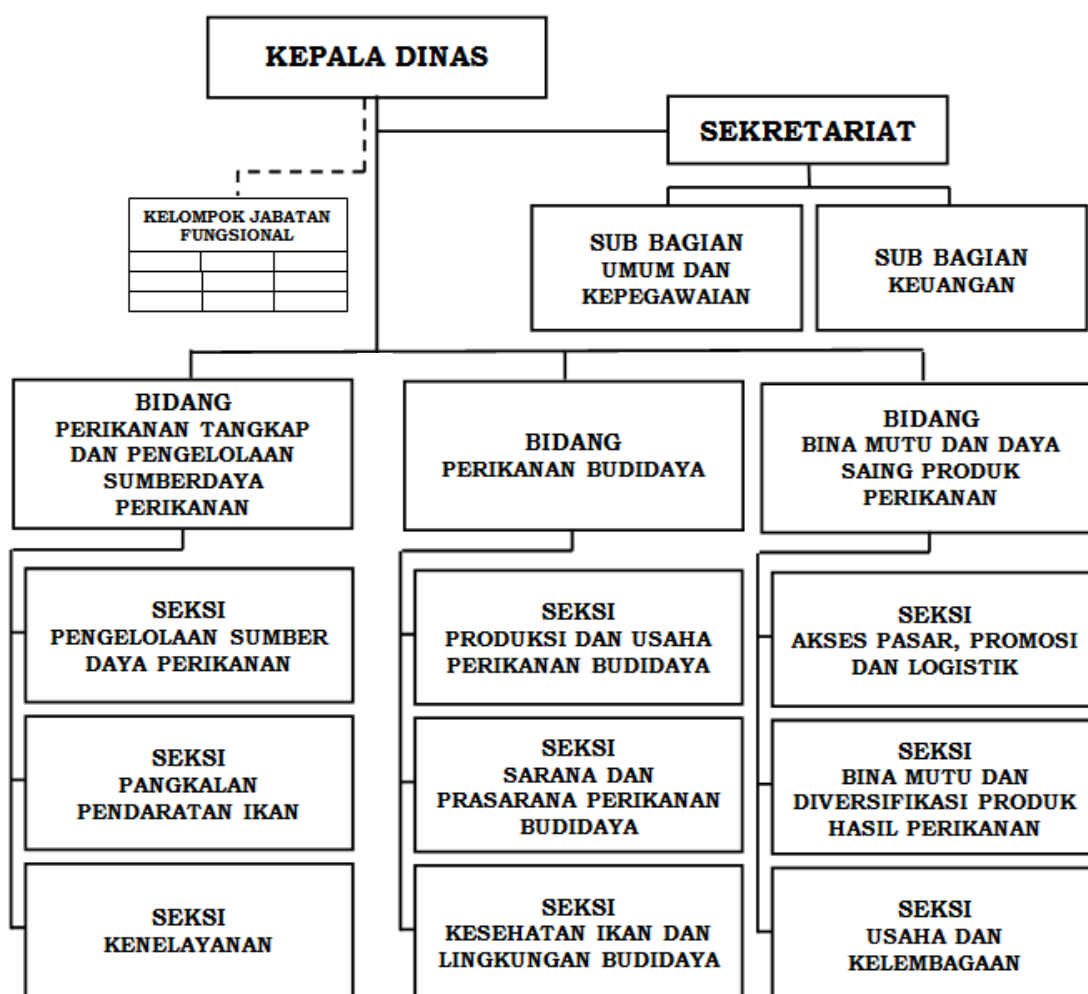
Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Bina Mutu dan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengolahan mutu dan promosi produk perikanan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan jaminan mutu dan keamanan produk hasil perikanan;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan investasi dan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- e. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- f. Pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi dokumen teknis perijinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas kabupaten/kota;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

D. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Perda No. Tahun 2016 Struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang sebagaimana pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang

E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang perlu memperhatikan faktor lingkungan internal dan eksternal. Adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi :

1. Lingkungan Internal
 - a. Kekuatan

-
-
- 1) Adanya Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan sebagai pengelola fasilitas prasarana perikanan dalam upaya pemberdayaan usaha perikanan.
 - 2) Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan cukup besar
- b. Kelemahan**
- 1) Keterbatasan sumberdaya manusia baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam pengelolaan fasilitas prasarana perikanan
 - 2) Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2. Lingkungan Eksternal**
- a. Peluang**
- 1) Kegiatan usaha perikanan tidak terpengaruh oleh situasi krisis ekonomi/moneter
 - 2) Kegiatan usaha perikanan dapat dilaksanakan secara luas oleh masyarakat
 - 3) Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan pembangunan perikanan dan kelautan
 - 4) Dukungan pemerintah pusat dan propinsi bagi pengembangan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan
- b. Tantangan**
- 1) Semakin meningkatnya kebutuhan dan konsumsi ikan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
 - 2) Kegiatan usaha perikanan memiliki nilai strategis dan potensi untuk dikembangkan sebagai basis pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di pedesaan.
 - 3) Usaha perikanan sebagai salah satu pusat pengembangan usaha ekonomi daerah (pengembangan ekonomi wilayah).
 - 4) Dengan semakin tersedianya prasarana perikanan, maka terjadi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan sumberdaya perikanan.

F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

I. Gambaran kondisi sekarang :

- a. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 mendapatkan kenaikan yang optimal sebesar 5.368,07 ton/th.
- b. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2016 mendapatkan kenaikan yang optimal sebesar 3.096,05 ton/th.
- c. Konsumsi ikan masyarakat yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 22,32 kg/kap/th.
- d. Sumberdaya manusia perikanan dan kelautan relatif masih rendah (kuantitas dan kualitas).

-
-
- e. Sarana prasarana perikanan dan kelautan (pangkalan pendaratan ikan, penampungan ekspor, cold storage, Hatchery, pasar ikan higienis, armada perikanan, dsb) belum memadai.
 - f. Pemanfaatan sumberdaya perikanan belum optimal.

II. Kondisi yang diharapkan pada masa mendatang :

- a. Produksi perikanan optimal.
- b. Konsumsi ikan masyarakat lebih dari 26,5 kg/kap/th (Standar nasional).
- c. Pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan tinggi.
- d. Sumberdaya manusia perikanan dan kelautan optimal (dalam kuantitas dan kualitas).
- e. Ketersediaan sarana prasarana perikanan dan kelautan (pangkalan pendaratan ikan, penampungan ekspor, cold storage, Hatchery, pasar ikan higienis, armada perikanan, dsb) yang memadai.
- f. Pemanfaatan sumberdaya perikanan optimal.

III. Isu/permasalahan strategis organisasi :

- a. Masih rendahnya produktifitas perikanan
- b. Ketersediaan sarana prasarana perikanan masih belum memadai baik kuantitas maupun kualitas

IV. Strategi :

- a. Masih rendahnya produktifitas perikanan
 1. Menetapkan kawasan yang dapat dijadikan sebagai kawasan pengembangan kegiatan usaha perikanan dan kelautan melalui perda.
 2. Mengembangkan program peningkatan sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan melalui diklat dan pemagangan.
 3. Mengembangkan dan memperkuat jaringan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan.
 4. Pengembangan komoditi ekspor hasil perikanan dan produk-produk unggulan.
 5. Pengembangan potensi sumberdaya perikanan berbasis pertumbuhan ekonomi khususnya di pedesaan.
 6. Menanamkan wawasan serta memperkuat sistim informasi perikanan dan kelautan.
 7. Memberdayakan sosial ekonomi masyarakat perikanan dan kelautan.
- b. Ketersediaan sarana prasarana perikanan masih belum memadai baik kualitas maupun kuantitasnya.
 1. Penguatan dan pengembangan kelompok ekonomi rakyat berbasis perikanan.

2. Memanfaatkan sumberdaya-jasa perikanan secara optimal, efisien dan berkelanjutan.
3. Mengusulkan program peningkatan kualitas sumberdaya manusia perikanan.
4. Melaksanakan pengadaan sarana prasarana untuk meningkatkan sumberdaya perikanan.
5. Memantapkan pengembangan usaha perikanan agar dapat memperkuat basis pertumbuhan ekonomi dengan upaya pengembangan produk-produk unggulan disesuaikan dengan potensi sumberdaya perikanan setempat.
6. Mendorong partisipasi masyarakat setempat dan swasta dalam pengembangan usaha perikanan.

BAB II RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

Dengan memperhatikan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang, maka Visi Pembangunan Dinas Perikanan periode 2015-2019 sesuai dengan visi kepala daerah (Bupati) Kabupaten Lumajang adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang turut serta dalam mengemban misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah (Bupati) yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesejahteraan dan Pembinaan Keagamaan.
- 2) Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta usaha Pendukungnya.
- 3) Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

Dari ketiga misi di atas, maka yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang yaitu misi kedua yang berbunyi :

“Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya”

Untuk menjalankan misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah di atas, maka Dinas Perikanan akan menjalankan tupoksi yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD yaitu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan Kabupaten Lumajang. Selain itu, Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang juga akan meningkatkan perekonomian daerah dan juga kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Adapun tujuan Dinas Perikanan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Perikanan di Kabupaten Lumajang terangkum dalam tabel dibawah ini.

MISI – TUJUAN:

MISI	TUJUAN
Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector perikanan dalam PDRB

Sedangkan sasaran organisasi adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantatif sehingga dapat diukur. Adapun sasaran Dinas Perikanan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Perikanan di Kabupaten Lumajang terangkum dalam tabel dibawah ini.

TUJUAN – SASARAN:

TUJUAN	SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR
MISI 2		
Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya	Meningkatnya produksi perikanan	a. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap b. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya
	Meningkatnya nilai tambah produk perikanan	Nilai tambah produk hasil perikanan

BAB III
RENCANA KINERJA TAHUN 2018

A. PROGRAM UTAMA

Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Bupati Lumajang ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya kelautan dan perikanan saat ini. Sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini.

*Program Utama dan Kegiatan
Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang Tahun 2018*

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur - Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana aparatur
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
4	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	- Pembinaan Masyarakat Pesisir
5	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	- Pengembangan Konservasi dan Restocking Perairan Umum Pesisir - Rehabilitasi dan Penanaman Vegetasi Pantai di Kawasan Pesisir
8	Peningkatan Kesadaran dan Pencegahan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	- Pembinaan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
9	Pengembangan Budidaya Perikanan	- Pengembangan Bibit Ikan Unggul - Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan - Pembinaan dan Pengembangan Perikanan - Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan - Operasional Balai Benih Ikan - Pengembangan Karamba - Pengembangan Komoditas Unggulan Budidaya Perikanan - Pengembangan Budidaya Ikan di Kolam Pekarangan - Optimalisasi Lahan untuk Budidaya Perikanan
10	Pengembangan Perikanan Tangkap	- Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap - Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat

		Pelelangan Ikan (TPI) - Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap - Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan - Pengembangan Armada Perikanan - Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan
11	Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	- Bimbingan/Temu Teknis Pelaku Utama Perikanan
12.	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	- Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan - Pengembangan Sarana Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan - Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan - Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) - Pengawasan Mutu Produksi Hasil Perikanan - Pendampingan Pada Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran dan indikator kinerja pembangunan perikanan dapat dilihat dari berbagai hal seperti dampak, manfaat, hasil, keluaran dan masukan dari pembangunan perikanan. Untuk dapat mencapai standar kinerja ditetapkan rincian indikator pembangunan perikanan dari masing – masing kegiatan yang ada seperti pada tabel berikut ini.

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang Tahun 2018

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan sarpras perkantoran		
	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran		Pelayanan pemenuhan kebutuhan administrasi dan operasional perkantoran	12 bulan
2.	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan sarpras perkantoran		
	Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur		Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	11 unit
	Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana aparatur		Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	45 kendr. Dinas, 10 unit AC, 20 unit komp+printer, 1 unit ged. Kantor
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan		

Kienrja Dan Keuangan				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	10 dokumen
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	10 dokumen
	Penyusunan laporan indeks kepuasan masyarakat		Jumlah laporan indeks kepuasan masyarakat	20 dokumen
6.	Pemberdayaan ekonomi msyarakat pesisir	Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut		
	Pembinaan masyarakat pesisir		Jumlah nelayan yang mengikuti pembinaan masyarakat pesisir	50 peserta
7.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum		
	Pengembangan Konservasi dan Restocking Perairan Umum Pesisir		Jumlah perairan umum yang dilakukan penebaran	12 perairan umum
	Rehabilitasi dan Penanaman Vegetasi Pantai di Kawasan Pesisir		Jumlah mangrove dan cemara laut yang ditanam	3.000 btg mangrove, 15.000 btg cemara laut
8.	Peningkatan Kesadaran dan Pencegahan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut		
	Pembinaan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut		Jumlah peserta pembinaan kesadaran dan penegakan hukum	50 peserta
9.	Pengembangan budidaya perikanan	Peningkatan produksi perikanan budidaya di kolam, karamba, tambak		
	Pengembangan bibit ikan unggul		Jumlah induk ikan nila yang tersedia	150 kg induk ikan nila unggul
	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan		Jumlah peserta pendampingan kelompok tani pembudidaya ikan	40 peserta
	Pembinaan dan pengembangan perikanan		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan perikanan	165 peserta
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan		Jumlah Bangunan BBI yang direhab	2 BBI
	Operasional balai benih ikan		Jumlah pakan ikan yang tersedia	860 kg
	Pengembangan karamba		Jumlah POKDAKAN yang diberikan paket bantuan hibah	3 kelompok
	Pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan		Jumlah POKDAKAN yang diberikan paket bantuan hibah	5 kelompok
	Pengembangan budidaya perikanan di kolam pekarangan		Jumlah POKDAKAN yang diberikan paket bantuan hibah	14 kelompok
	Optimalisasi lahan untuk budidaya perikanan		Jumlah POKDAKAN yang diberikan paket bantuan hibah	5 kelompok
10	Pengembangan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut		
	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan tangkap		Jumlah peserta pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap	40 peserta

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan		Jumlah gedung TPI yang terpelihara	1 unit
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikan tangkap		Jumlah KUB Nelayan yang menerima paket bantuan hibah	13 kelompok
	Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknologi penangkapan ikan	50 peserta
	Pengembangan Armada Perikanan		Jumlah KUB Nelayan yang menerima paket bantuan hibah	11 kelompok
	Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan		Jumlah kelompok yang menerima paket bantuan hibah	11 kelompok
11	Pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Peningkatan konsumsi ikan masyarakat		
	Bimbingan/temu teknis pelaku utama perikanan		Jumlah peserta yang mengikuti bimtek pelaku utama perikanan	50 peserta
12.	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Peningkatan konsumsi ikan masyarakat dan nilai tambah produk hasil perikanan		
	Pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan		Jumlah paket bantuan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan untuk POKLAHSAR	6 kelompok
	Pengembangan sarana prasarana pemasaran hasil perikanan		Jumlah paket bantuan sarana prasarana pemasaran hasil perikanan untuk POKLAHSAR	4 kelompok
	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahan hasil perikanan	30 peserta
	Gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN)		Terseleenggaranya Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)	1.500 peserta
	Pengawasan Mutu Produksi Hasil Perikanan		Jumlah kegiatan dalam rangka pengawasan mutu produksi hasil perikanan	2 kegiatan
	Pendampingan Pada Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan		Jumlah peserta yang mengikuti pendampingan kelompok pengolahan dan pemasar hasil perikanan	30 orang

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan, sebesar *Rp. 6.670.211.055,-* yaitu untuk Belanja Langsung sebesar *Rp. 5.175.400.000,-* dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar *Rp. 1.469.811.055,-* adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Kinerja Tahun 2018.

**BAB IV
PENUTUP**

Demikian rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA Tahun 2018.

Lumajang, 19 Oktober 2017

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUMAJANG**



I. SYAIFUL, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600322 198603 1 009